

MANAJEMEN KEBIJAKAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Alief Munandar Hamzah^{1*}, Nasrul Haq², Riskasari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the management of the Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidy policy in Bajeng Barat District, Gowa Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Furthermore, the data is processed and analyzed qualitatively with systematic stages. The results show that the LPG subsidy policy management has been implemented well in several management functions. However, the implementation of other management functions is still not optimal. Planning is carried out in accordance with the authority of each party. The organization does not take place formally because each party has different duties and responsibilities. The briefing is carried out by the Gowa Regency Government seriously through the relevant regional apparatus organizations, but agents and bases are always not orderly in reporting realization data to the government. Coordination is carried out actively if there are problems such as tube scarcity and substandard distribution. Control or supervision is sometimes less than optimal due to limited government personnel.

Keywords: management, subsidy policy, lpg

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen kebijakan subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kebijakan subsidi LPG telah dilaksanakan dengan baik pada beberapa fungsi manajemen. Namun, penerapan fungsi-fungsi manajemen lainnya masih belum maksimal. Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Pengorganisasian tidak berlangsung formal karena masing-masing pihak punya tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Pengarahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa secara serius melalui organisasi perangkat daerah terkait, namun agen dan pangkalan selalu tidak tertib dalam melaporkan data realisasi kepada pemerintah. Pengkoordinasian dilakukan secara aktif apabila ada masalah yang terjadi seperti kelangkaan tabung dan distribusi kurang lancar. Pengendalian atau pengawasan kadang kurang maksimal karena personil pemerintah yang terbatas.

Kata kunci: manajemen, kebijakan subsidi, lpg

*alifmunandarhamzah@gmail.com

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg (kilogram) atau yang lazim dikenal dengan istilah *gas elpiji* merupakan salah satu jenis barang penting yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Barang penting diarahkan pada komoditas barang strategis yang memiliki peran penting dalam kelancaran pembangunan nasional dan daerah. Kecukupan LPG 3 kg sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pihak lainnya yang terkait. LPG bagian dari program konversi minyak tanah. Substitusi penggunaan minyak tanah ke LPG dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Subsidi yang dilakukan oleh pemerintah bagian dari kebijakan fiskal strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Pengadaan LPG tabung 3 kg menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional. Kebijakan tersebut bentuk upaya nyata dari pemerintah dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah

tangga tidak mampu agar tercipta akses energi yang adil bagi semua kalangan. Reformasi kebijakan subsidi energi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, mendorong inklusivitas, meningkatkan daya saing dan perwujudan skema perlindungan sosial (Gobel dkk, 2021). Hal tersebut bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebelumnya, subsidi gas elpiji 3 kg sudah menjadi agenda nasional pemerintah yang dilaksanakan pada semua daerah. Hal yang dilakukan setiap periode pemerintahan yakni menjaga stabilitas subsidi pada masyarakat penerima manfaat.

Sejak dilakukan konversi pada tahun 2006, sasaran penerima manfaat mengalami perubahan sebanyak tiga kali berdasar pada peraturan presiden. Pertama, LPG 3 kg diperuntukkan pada rumah tangga dan usaha mikro berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg. Kedua, LPG 3 kg diperuntukkan pada kapal perikanan bagi nelayan kecil berdasar Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Ketiga,

sebagai perubahan dari peraturan presiden sebelumnya, LPG 3 kg diperuntukkan pada mesin pompa air bagi petani sasaran berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Secara umum, masalah yang terjadi berdasar hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) yakni 1) masalah desain kebijakan meliputi penargetan terhadap sasaran program yang lemah, data penerima subsidi tidak tersedia secara kredibel, Harga Jual Eceran (HJE) bersubsidi yang belum pernah mengalami penyesuaian, 2) masalah pengelolaan anggaran meliputi ketidaksesuaian kuota yang diberikan dengan konsumsi aktual masyarakat, ketidakpastian dalam penentuan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan, beban fiskal yang diprediksi semakin bertambah; 3) masalah pendistribusian meliputi, distribusi dan kompetisi yang masih terbatas, pengendalian dan pemantauan distribusi produk, masih terjadinya kesalahan penyertaan dalam penerima

manfaat, penetapan harga yang bervariasi dan cukup tinggi di pengecer.

Secara khusus, persoalan kelangkaan kerap terjadi di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada saat musim pertanian berdasar hasil observasi peneliti. Kelangkaan tersebut terjadi karena permintaan masyarakat tidak sebanding kuota yang diberikan pada setiap agen dan atau pangkalan terdekat. Penggunaan untuk sektor pertanian oleh masyarakat dinilai sebagai penyebab kelangkaan dan hal tersebut tidak tepat sasaran menurut pihak Pertamina (<https://makassar.sindonews.com>).

Adapun LPG yang ditemukan pada sejumlah pengecer di Kecamatan Bajeng dan sekitarnya yang masih menyimpan tabung gas pada musim pertanian, harganya bertambah dari Rp. 16.000 menjadi Rp.25.000 per tabung (<https://makassar.tribunnews.com/>).

Situasi dan kondisi tersebut hampir terjadi setiap tahun. Kelangkaan yang kerap terjadi pada musim panen mestinya diantisipasi lebih awal oleh pemerintah setempat sebagai pengendali wilayah dengan koordinasi bersama PT. Pertamina sebagai pengendali nasional.

Pada prinsipnya, kelangkaan terjadi karena penerima manfaat subsidi dinilai tidak tepat sasaran di Kecamatan

Bajeng Barat. Ada disparitas yang tinggi antara persediaan tabung dan permintaan masyarakat. Penerapan fungsi-fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian atau pengawasan perlu diteliti secara mendalam pada kasus tersebut. Henry Fayol dan Lyndall Urwick juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan organisasi (Nashar, 2013). Kajian manajemen dalam LPG perlu diteliti pada konteks yang lebih kecil dalam perspektif administrasi negara atau publik demi pembelajaran detail perihal upaya yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait. Proses manajemen yang baik dapat meminimalkan persoalan-persoalan yang terjadi. Manajemen sebagai inti dari organisasi adalah suatu instrumen dalam penyelesaian masalah.

Dalam proses pendistribusian terdapat hubungan erat antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Pertamina. PT Pertamina dan badan usaha mitra bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada agen dan konsumen, sementara Pemerintah Kabupaten Gowa bertugas untuk melakukan fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai

pengawasan. Pemerintah Kabupaten Gowa juga berperan dalam pembinaan distribusi gas LPG 3 kg dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemilihan Kecamatan Bajeng Barat sebagai lokasi penelitian berdasar pada hasil observasi beberapa tahun terakhir dan pemberitaan terkini dari media massa yang kerap menyoroti ketersediaan dan distribusi gas elpiji. Pada berbagai persoalan yang muncul, kunci permasalahan utamanya dari aspek teoritis dan praktis adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen yang kurang baik.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk (barang dan jasa) menurut Priyono (2007). Dalam berbagai literatur menyarankan agar manajemen

mendapat perhatian utama dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak kegagalan dalam berbagai kegiatan pemerintah atau non pemerintah karena manajemen yang kurang bagus. Manajemen dalam kebijakan LPG memerankan posisi yang strategis. Apalagi urusan tersebut memiliki rantai kendali yang sangat kompleks. Pelibatan pihak pemerintah dan non pemerintah secara aktif pada urusan yang sama.

Manajemen adalah suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi (Sarinah, 2017). Selanjutnya, Wijayanti (2008) memandang manajemen secara lebih detail dengan merinci pengertian sebagai berikut 1) manajemen sebagai seni merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, 2) manajemen sebagai proses yang dimaknai perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan dan pelaporan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, 3) manajemen sebagai ilmu dan seni yang dimaknai sebagai suatu bidang ilmu

pengetahuan, (*science*) yang dimaksudkan secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan serta membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Selain PT. Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat juga memiliki peran yang strategis. Tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi tersebut diatur dalam regulasi yang terkait dengan LPG tabung 3 kg. Persoalan yang terkait dengan gas elpiji bukan perkara mudah. Ini salah satu masalah yang kompleks. Banyak pihak yang terlibat didalamnya. Pihak swasta dan masyarakat juga terlibat aktif sebagai pemilik Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, sub agen atau pangkalan dan pengecer. Rantai kendali pada semua daerah sama. Semua aturan dan ketentuan diatur oleh pemerintah dan PT. Pertamina. Masalah yang terjadi pada Kecamatan Bajeng Barat merupakan salah satu kasus dari banyaknya kasus yang ada di Indonesia. Permasalahan demi permasalahan yang terjadi relatif sama. Karena itu, penelitian ini dapat menjadi pengkajian

yang dapat memperkuat pengkajian berikutnya.

METODE PENELITIAN

Secara geografis, lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini di Kecamatan Bajeng Barat didasarkan pada pertimbangan tertentu perihal masalah yang diteliti. Secara kelembagaan, lokasi penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa berlokasi di Jalan Mesjid Raya Nomor 34 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian pada instansi tersebut karena Organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perihal pengadaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa. Jadi penelitian ini dilakukan berdasar pada pertimbangan tugas sektoral dan tugas regional organisasi perangkat daerah. Untuk keperluan penguatan data, penelitian juga dilakukan pada SPPBE, agen dan pangkalan yang ada di Kecamatan Bajeng Barat dan sekitarnya di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan kenyataan dari

kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan demi memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami secara mendalam perihal manajemen dalam kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian kualitatif diharapkan dapat memberi informasi baru perihal objek penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui kasus esensial yang terjadi sesuai dengan peristiwa social atau fenomena lapangan. Riset studi kasus selalu berusaha untuk mengkaji kasus demi kasus atau pengalaman-pengalaman personal ke dalam kesamaan pemaknaan atau esensi universal (*essentializing*) dari suatu fenomena yang dilakukan secara sadar oleh pelaksana atau penerima manfaat. Dalam rangka pemaksimalan data, keterbukaan informan yang dikaitkan dengan observasi dan dokumen relevan sangat dibutuhkan.

Pemilihan informan dalam hal ini dilakukan secara *proporsive* atau sengaja dipilih yang didasarkan. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan keperluan peneliti. Informan

penelitian yakni orang-orang yang berkompoten untuk memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai manajemen dalam kebijakan *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa yang mengurus LPG tabung 3 kg. Informan lainnya seperti SPPBE, agen, pangkalan dan penerima manfaat LPG 3 kg Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa merupakan informan yang melengkapi data informan kunci. Pihak yang menjadi informan kunci yakni perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gowa yang punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai persoalan LPG tabung 3 kg. Dalam hal ini, persoalan LPG tabung 3 kg dikaitkan dengan dimaksud kejadian yang terjadi di Kecamatan Bajeng Barat.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi atau gabungan triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gowa memiliki 18 kecamatan yang secara geografis wilayah tersebar pada daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Kecamatan Bajeng Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bajeng. Kecamatan Bajeng Barat membawahi 7 desa, yaitu Desa Gentungang, Desa Tanabangka, Desa Borimatangkasa, Desa Mandalle, Desa Manjalling, Desa Kalemandalle dan Desa Bontomanai.

Ibukota Kecamatan Bajeng Barat adalah Romangbone yang terletak di Desa Borimatangkasa. Jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa yakni sekitar 15 km. Berdata Kecamatan Bajeng Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Bajeng Barat tercatat sebanyak 24.657 jiwa yang terdiri atas laki-laki 11.989 jiwa dan perempuan 12.668 jiwa.

Visi Kecamatan Bajeng Barat yakni “terwujudnya kualitas hidup masyarakat dengan pelayanan prima profesional dan transparan dalam

penyelenggaraan pemerintahan”. Selanjutnya, visi Kecamatan Bajeng Barat dijabarkan ke dalam beberapa misi, yaitu sebagai berikut 1) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pembinaan desa, ketentraman dan ketertiban serta kesekretariatan, 2) meningkatkan keberdayaan masyarakat dan Mmengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

Rumusan misi tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan tindaklanjut dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Bajeng Barat berdasarkan misinya adalah sebagai berikut 1) meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kecamatan dan kelurahan, 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan, 3) mengembangkan kegiatan – kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, dengan sasaran berkembangnya kegiatan usaha

ekonomi produktif masyarakat dan keluarga.

Dinas perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaran tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 2) penyelenggaraan urusan pemerinyahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan, 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, 4) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, 5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan

tekanan tertentu pada tabung untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya. LPG terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat LPG 3 Kg adalah LPG tertentu yang mempunyai kekhususan. Kekhususan terletak pada pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang diberikan subsidi dari pemerintah. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual *Liquefied Petroleum Gas* di daerah atau wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan HET LPG 3 Kg di Provinsi, yang berada di dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) atau *Filling Station* sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah). HET LPG 3 kg ditetapkan dengan rincian sebagai berikut 1) harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* (termasuk Pajak Pertambahan Nilai

sejumlah 10% (sepuluh persen)) seharga Rp. 11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah); 2) margin Agen seharga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah); 3) Biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah); 4) Harga Agen ke Pangkalan seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); 5) Margin Pangkalan seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Untuk wilayah darat Kabupaten/Kota yang di luar radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp. 20,-/tabung/km (dua puluh rupiah per tabung per kilometer). Selanjutnya, Peraturan Bupati Kabupaten Gowa menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Daerah. Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg berlaku untuk pangkalan di daerah yakni 1) Harga tebus pertamina Rp.11.588; 2) Margin agen dataran rendah Rp.2.412; 3) Harga tebus pangkalan Rp.14.000; 4) Margin pangkalan dataran rendah Rp.2000; 5) HET agen ke pangkalan dataran rendah Rp.16.000; 6) Harga tebus pertamina Rp.11.588; 7) Margin agen dataran tinggi Rp.3.412; 8) Harga tebus

pangkalan Rp.15.000; 9) Margin pangkalan dataran tinggi Rp.3.000; 10) HET tingkat pangkalan dataran tinggi Rp.18.000.

Perencanaan

Perencanaan dalam pengadaan LPG tabung 3 kg di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dimulai dari penetapan agen dan jumlah pangkalan sekaligus penetapan jumlah tabung yang diperuntukan untuk masyarakat miskin oleh PT. Pertamina Region IV Sulawesi. Langkah awal, proses pendataan atas dasar kemauan masyarakat di suatu desa kepada pemerintah desa setempat. Setelah itu, pemerintah desa setempat membawa data tersebut ke agen. Selanjutnya, agen melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa untuk mendapatkan rekomendasi. Data tersebut juga sekaligus sebagai lampiran persetujuan Pemerintah Kabupaten Gowa kepada agen sebagai syarat administratif persuratan ke PT. Pertamina Region IV Sulawesi.

Tahap berikutnya, pihak PT. Pertamina Region IV Sulawesi yang menentukan pihak agen dan jumlah kuotanya. Laporan tersebut dikoordinasikan ke Depot untuk disediakan dan disesuaikan dengan permintaan. Kemudian, PT. Pertamina

dan agen menentukan pihak yang ditunjuk menjadi pangkalan.

Dalam setiap bulan, agen menerima kuota dari SPPBE sekitar tujuh puluh ribuan buah tabung LPG atau elpiji yang distribusikan ke pangkalan. Setiap bulannya, kurang lebih 120 mobil yang membawa tabung dari SPPBE. Setiap mobil memuat 560 tabung dalam satu kali pengangkutan. Jumlah kuota tersebut bervariasi setiap agen berdasar jumlah pangkalan yang menjadi mitranya.

Semakin banyak pangkalan yang dilayani maka akan semakin banyak kuota LPG yang diberikan kepada agen. Pangkalan dilayani oleh agen bukan hanya, khusus, di Kecamatan Bajeng atau Bajeng Barat melainkan juga bisa dari kecamatan lain seperti Malino, Malakaji dan Biring Bulu. Poin pentingnya ialah pangkalan yang dilayani tidak keluar dari Kabupaten Gowa. Pada tabel tersebut diatas, ada beberapa agen yang mendapatkan kuota dan realisasi lebih banyak dibanding agen yang lain. Semua jumlah kuota ditentukan oleh PT. Pertamina setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Untuk pengadaan pada penerima manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai peraturan, ada juga tahapan pengadaannya. Salah

seorang petani sebagai penerima manfaat menjelaskan bahwa untuk mendapatkan LPG Tabung 3 kg maka semua masyarakat harus membeli tabung kosong ke agen atau pangkalan terlebih dahulu.

Selanjutnya, apabila ada seseorang yang ingin membuka pangkalan di sekitar Kecamatan Bajeng Barat maka tahap yang ditempuh harus melalui agen serta menyurat ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdartri). Surat rekomendasi yang diberikan oleh Disperdartri menjadi lampiran ke Pertamina. Pertamina yang menentukan persetujuan sebagaimana yang dilakukan dalam pembentukan agen. Setelah disetujui oleh pihak Pertamina untuk menjadi pangkalan, PT. Pertamina akan menunjuk agen yang menjadi distributor pangkalan baru tersebut.

Dalam rangka pengadaan LPG tabung 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai fasilitator. Tugasnya utamanya sebagai pengawas pendistribusian elpiji ke masyarakat yang layak menggunakan tabung 3 kg, khususnya untuk masyarakat yang kondisi ekonominya rendah. Dalam hal rencana pengadaan LPG tabung 3 kg di masyarakat, semuanya dilengkapi oleh PT. Pertamina.

Jadi, alur tahap perencanaan dalam pengadaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg sebelum sampai ke masyarakat melalui mekanisme yang sistematis dan terukur. Semua mekanisme ditentukan oleh PT. Pertamina mulai dari pembentukan untuk menjadi agen, mendirikan pangkalan dan penentuan kuota per setiap harinya. Disperdartri sebagai wakil pemerintah bertugas sebagai pihak penyambung ke PT. Pertamina yang mengeluarkan persetujuan dalam bentuk surat rekomendasi apabila ada agen dan pangkalan yang berkepentingan dengan kebutuhan LPG tabung 3 kg.

Pengorganisasian

Setelah perencanaan dilakukan, selanjutnya adalah pengorganisasian. LPG bersubsidi disalurkan Pemerintah kepada masyarakat melalui Pertamina Subsidi dibayarkan sebesar volume penyaluran ke masyarakat Konsumen Pengguna yakni rumah tangga, usaha mikro, kapal perikanan bagi nelayan kecil dan petani penerima manfaat sesuai Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg & Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan

Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

Dalam pengorganisasian, SPPBE adalah pihak pertama yang menjadi organ atau rantai kendali PT. Pertamina yang sangat penting dalam pendistribusian LPG Tabung 3 kg. Pihak Agen akan berbelanja langsung ke Depot melalui PT. Pertamina. Hasil pembelian tersebut dibawa ke SPPBE. Jadi, semua agen yang ada di Kabupaten Gowa mengisi tabung di SPPBE setiap harinya.

Itulah tahap awal jalur pendistribusian dari SPPBE ke agen. Apabila agen sudah mengisi di SPPBE, maka semua tabung yang sudah diisi akan di hitung ulang oleh agen di tempat penampungannya. Oleh karena itu, agen juga memiliki beberapa pekerja yang siap menghitung ulang. Selanjutnya, admin agen akan menverifikasi setiap pangkalan yang sudah melakukan pembelian. Pangkalan yang sudah membeli ke agen akan siap diantarkan sesuai dengan kuota yang sudah dibelanjakan.

Sampai pada tahap itu, pihak Disperdartri juga melakukan monitoring karena sering menjumpai agen yang nakal dan banyak permainan. Salah satu diantaranya yakni kuota milik pangkalan dialihkan ke pengecer. Pangkalan juga biasa menaikkan harga

tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Penimbunan dan kelangkaan memang biasa terjadi di masyarakat. Agen dan pangkalan sering melakukan penimbunan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan di masyarakat. Kejadian ini tentunya sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam pengorganisasian, PT. Pertamina membentuk Depot sebagai tempat penampungan LPG. Semua SPPBE yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, mengisi di Depot tersebut. Selanjutnya, agen sebagai pilar kedua PT. Pertamina memiliki beberapa anggota seperti supir, karyawan pembantu supir dan karyawan gudang yang selalu menjaga keamanan gudang. Untuk menjadi agen, ada beberapa syarat yang harus di lengkapi. Salah satunya yakni memiliki minimal 1 buah mobil truk sebagai mobil pengangkut LPG dari SPPBE, 1 buah mobil *pick up* berfungsi untuk mengantar ke pangkalan dan tempat yang sudah di standarisasi keamanannya.

Pengarahan

Pengarahan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pengarahan memiliki prinsip bahwa apabila perencanaan pekerjaan sudah

tersusun dengan baik, struktur organisasi sudah ditetapkan maka orang-orang atau lembaga yang ada di dalam struktur atau jaringan tersebut digerakkan secara maksimal agar tujuan utama bisa tercapai secara maksimal. Pengarahan sangat diperlukan ketika hal yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai, bahkan menyimpang dari sesuatu yang telah ditentukan, seperti LPG tabung 3 kg digunakan tidak sesuai peruntukan. Pengarahan juga sangat penting apabila harga yang laku di masyarakat di atas HET dan digunakan oleh orang-orang yang tingkat ekonominya di atas standar.

Dalam hal stabilisasi keadaan di masyarakat, agen menyampaikan kepada semua masyarakat untuk menggunakan LPG non subsidi agar tidak terjadi kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, hal itu disebabkan karena kebutuhan masyarakat meningkat. Kebutuhan masyarakat berbeda-beda setiap musim tertentu. Ada musim pesta budaya dan musim kemarau. Saat musim seperti itulah kebutuhan LPG tabung 3 kg masyarakat bertambah. Pada dasarnya, pihak agen sudah menyampaikan beberapa kali kepada masyarakat untuk membeli elpiji non subsidi namun masyarakat tetap membeli elpiji subsidi. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa enggan membeli elpiji non

subsidi yang berukuran lebih besar dengan volume yang berat.

Disamping itu, harga elpiji non subsidi lebih mahal daripada subsidi. Kemudian, apabila ada salah seorang masyarakat yang pesta, masyarakat mencari yang mudah dijangkau di eceran dan juga mudah digunakan. Disamping itu, LPG non subsidi mahal. Masyarakat menginginkan ada LPG yang diproduksi dengan volume dan beratnya sama dengan LPG tabung 3 kg. Masyarakat berpeluang membeli LPG tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Pulau Sumatera dan Aceh dengan memproduksi yang sama ukurannya dengan LPG tabung 3 kg mencegah terjadinya kelangkaan. Hal itu dikatakan oleh petani yang sebelumnya bekerja sebagai peternak ayam pedaging di Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat yang sering merasakan kelangkaan.

Petani menggunakan LPG tabung 3 kg sebagai bahan bakar disawah. LPG dipakai untuk mengairi sawahnya di musim kemarau pada bulan Agustus sampai November. Pada bulan tersebut, kondisi air di Bendungan Bili-bili sudah surut dan akhirnya tidak ada air yang mengalir di perkampungan, khususnya di Kecamatan Bajeng Barat. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya,

kelangkaan di Kecamatan Bajeng Barat kerap terjadi. Jadi, pada dasarnya kelangkaan ini tidak terjadi di setiap bulannya tetapi pada saat masuk bulan kemarau LPG tabung 3 kg mulai langka. Hal ini disebabkan melonjaknya pemakaian di bulan kemarau di samping digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. LPG tabung 3 kg ini dipakai oleh para petani sebagai bahan bakar untuk pompa airnya. Hampir semua pompa air yang ada di Kecamatan Bajeng Barat sudah tidak ada lagi yang memakai bensin premium.

Untuk masa penggarapan lahan tanam, para petani membutuhkan dua sampai tiga LPG tabung 3 kg. Hal itu digunakan sampai masuk proses penanaman bibit. Hal itu dilakukan selama dua hari karena sawah pada saat penggarapan membutuhkan air yang banyak supaya tanah muda gembur. Di musim kemarau atau di sebut gaduh tiga merupakan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan taraf hidup karena untuk gaduh pertama dan gaduh kedua digunakan untuk kebutuhan sehari hari. Disaat memasuki gaduh tiga, hasil panen padi dan palawija bisa dipakai untuk biaya kebutuhan pendidikan bagi anak anak petani. Itulah yang membuat para petani beralih ke LPG 3 kg.

Kelangkaan LPG tabung 3 kg yang terdistribusi sampai ke konsumen

biasa disebabkan oleh para petani, digunakan untuk laundry dan peternakan. Bagi petani, untuk penggunaan LPG 3 kg di sawah sangat membantu. Sawah yang berukuran 20 are dalam 1 kali pengairan di beri air hanya memerlukan $\frac{1}{2}$ LPG 3 kg. Penggunaan premium menggunakan 5 liter pada luas lahan yang sama. Jadi , apabila dihitung biayanya, LPG 3 kg menggunakan biaya Rp.12.000 dan premium dengan ukuran sawah 20 are per satu kali pengairan menggunakan biaya Rp. 30.000.

Para petani menginginkan pemerintah harus menyediakan kuota lebih untuk kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah perlu menangani air di saat gaduh tiga. Penanganan yang dilakukan pada saat gaduh tiga pasti tidak akan terjadi yang namanya kelangkaan. Saat petani di tegur oleh pangkalan dan agen tentang penggunaa LPG 3 kg untuk pengairan sawah, petani mengatakan mereka orang miskin dan layak mendapatkan LPG 3 kg. Semua hal yang terkait dengan pengadaan dan kelangkaan seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pihak yang memiliki otoritas di Kecamatan Bajeng Barat tidak boleh apatis terhadap masalah yang terjadi

dilapangan. Masalah seperti kelangkaan dan kebutuhan elpiji oleh masyarakat miskin mesti mendapat perhatian secara serius. Petani yang juga berstatus sebagai masyarakat miskin merasa berhak untuk menggunakan elpiji pada saat musim kemarau. Kelebihan tabung yang digunakan oleh petani menjadi tugas pemerintah untuk menemukan solusinya sejak dini. Apalagi masalah tersebut sering terjadi setiap tahun. Pemberian solusi dilakukan dengan pengarahan yang tepat pada semua pihak yang terkait.

Sebelum LPG Tabung 3 kg sampai ke konsumen, pihak PT. Pertamina, Disperdartri dan agen melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan LPG 3 kg (subsidi) dan tabung LPG 5,5 kg (non subsidi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu juga disampaikan ke kecamatan dan pemerintah desa demi tersosialisasinya penggunaan tabung LPG. Di satu sisi, ketika terjadi kelangkaan, pihak PT. Pertamina dan Disperdartri sering melakukan sidak ke lapangan. PT. Pertamina dan Disperdartri mendatangi agen, pangkalan dan juga masyarakat melakukan sosialisasi tentang penggunaan LPG. Pihak PT. Pertamina langsung memeriksa laporan penjualan pangkalan ketika mendengar dari berita

soal kelangkaan. Pengarahan langsung dilakukan tentang cara mendistribusikan LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran.

Pada prinsipnya, kuota yang diberikan oleh PT. Pertamina, melalui Depot ke SPPBE, ke agen dan pangkalan, tidak pernah terjadi kekurangan. Kelangkaan terjadi atau tidak berjalan lancar saat pendistribusian sampai pada pengecer. Kuota setiap hari yang di berikan Depot ke SPPBE sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang dipesan oleh agen melalui usulan kuota dari pangkalan. Harga di penyalur atau agen berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Permen ESDM No28/2008 dan KepMen ESDM7436.K/12/MEM/2016. Harga di Pangkalan atau Sub Penyalur berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerinta Daerah.

Pengkoordinasian

Semua kejadian di lapangan termasuk kelangkaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh agen dan pangkalan dikoordinasikan dengan PT. Pertamina. Penyelesaian dan tindaklanjutnya dilakukan secara bersama-sama. Saat rapat dengan PT. Pertamina, persoalan demi persoalan disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.

Bentuk koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Pertamina dilakukan secara formal dan non formal. Pada saat menjaga kestabilan pendistribusian, PT. Pertamina sering juga melakukan koordinasi ke agen dan pangkalan di Kabupaten Gowa. Selain itu, hasil penjualan agen ke pangkalan diarsipkan dan menjadi dokumen penting. Pada waktu tertentu, PT. Pertamina dan Disperdartri melakukan sidak dengan mendatangi agen. Sidak dimaksudkan untuk memeriksa laporan penjualan.

Sampai pada tahap tersebut, proses hubungan antara agen dan pangkalan tidak hanya melakukan transaksi pembelian. Apabila terjadi kelangkaan dilapangan, pihak agen sering juga mendatangi pangkalan dan melakukan sidak. Tantangan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg terhadap beberapa produk 1) penerima subsidi saat ini sulit diidentifikasi (siapa pun), 2) distribusi belum tepat sasaran (rawan diselewengkan), 3) jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi (berapapun), 4) rawan terjadinya pengoplosan dan penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi, 5) Harga ditingkat konsumen cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga

sulit dilakukan, 6) Anggaran Subsidi berpotensi tidak terkendali dengan jumlah yang cukup besar.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara ketat pada saat kelangkaan yang kerap terjadi pada musim kemarau atau pada saat gadu tiga. Disaat musim kemarau, para petani memakai LPG Tabung 3 kg untuk pompanisasi. Hal itu dilakukan karena menurut petani sangat bermanfaat dan sangat hemat dari segi biaya dibandingkan menggunakan premium bisa memangkas biaya seperduanya. Petani menggunakan premium untuk merawat tanam memakan biaya Rp 1.500.000 tapi dengan menggunakan LPG Tabung 3 kg ini paling banyak biayanya sekitar Rp 700.000 dalam setiap musim. Kejadian seperti ini yang banyak menyebabkan kelangkaan. Permintaan dari masyarakat tinggi sehingga kadang tidak sama dengan kuota yang diberikan. Pada saat musim kemarau, kadang ada oknum yang menimbun tabung. Itulah yang dirasakan Petani di Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat.

Semua petani yang ada di Kecamatan Bajeng Barat saat memasuki gadu 3 atau musim kemarau sangat sibuk berkeliling mencari LPG tabung 3

kg. Bahkan, apabila ada tetangga yang berpergian ke desa lain maka masyarakat kerap menitip tabung untuk ditukarkan. Tabung kosong dibawa ke berbagai daerah untuk ditukarkan.

Umumnya, pengawasan dilakukan dalam bentuk teguran. Bentuk teguran seperti itu yang sering disampaikan agen ke pangkalan ketika terjadi kelangkaan. Teguran dilakukan kepada masyarakat yang tidak layak menggunakan LPG Tabung 3 kg. Pangkalan merupakan terminal terakhir PT. Pertamina didalam melakukan pendistribusian. Kapasitas pangkalan yang disematkan sebagai bagian terpenting dalam menentukan pendistribusian LPG Tabung 3 kg. Pangkalan yang paling memahami penyaluran tabung tepat sasaran atau sebaliknya karena eksistensinya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengawasan yang dilakukan PT. Pertamina dan Disperdartri kepada pangkalan sangat diperhatikan. Apabila ada pangkalan yang melanggar peraturan yang ditetapkan, seperti menaikkan harga, maka Disperdartri tidak segan memerintahkan agen untuk melakukan pemutusan hubungan usaha. Bahkan pada kasus yang berat, pencabutan izin usaha dilakukan.

Seberapapun harga dinaikkan atau dimainkan oleh oknum, kebutuhan petani terhadap LPG Tabung 3 kg tidak bisa dihindari. Tabung LPG 3 kg sudah mejadi kebutuhan pokok petani. Petani bersedia dan terus berusaha membeli tabung selama harga yang diberikan tidak melebihi harga premium. Saat terjadi kelangkaan, Disperdartri dan PT. Pertamina kerap melakukan operasi pasar di daerah yang mengalami kelangkaan. Instansi tersebut juga mensosialisasikan masyarakat yang layak mendapatkan LPG tabung 3 kg.

Meskipun pemerintah telah banyak melakukan penagawasan dan sosialisasi ke masyarakat tentang peruntukan LPG tabung 3 kg, perdebatan tentang elpiji di kalangan masyarakat masih terjadi. Masyarakat yang layak menerima tabung menurut Disperdartri adalah sebagian besar petani. Akibat pembatasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah kepada petani, petani rela menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan dapur sehari-hari demi terpenuhinya kebutuhan air disawahnya.

Dalam rangka merespon reaksi petani tentang nilai LPG tabung 3 kg bagi kelangsungan kehidupannya yang sangat bermanfaat mendorong Disperdartri untuk bekerjasama dengan Dinas Pertanian dalam mengusulkan

penambahan kuota. Langkah ini sudah sangat tepat apabila dilaksanakan dengan baik. Namun, aturan terkait yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi salah satu alasan sehingga pencapaiannya tidak maksimal.

KESIMPULAN

Manajemen kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa telah dilaksanakan dengan baik pada beberapa fungsi manajemen. Namun, penerapan fungsi-fungsi manajemen lainnya masih belum maksimal sebagaimana mestinya.

Perencanaan perihal pengadaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg berdasar pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan juga sangat tergantung pada penganggaran subsidi setiap tahun oleh pemerintah pusat dan penetapan penyalur serta kuota tabung di Kecamatan Bajeng Barat oleh PT. Pertamina. Proses perencanaan sudah dilakukan dengan baik sekalipun pada bulan tertentu kelangkaan masih terjadi karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat.

Pengorganisasian LPG tabung 3 kg dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada semua tahapan kebijakan subsidi

tabung di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yakni Disperdastrri Kabupaten Gowa, SPPBE, Agen, Pangkalan dan pengecer. Prosesnya berjalan lancar meskipun pengorganisasian tidak berlangsung formal karena masing-masing pihak punya tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Pengorganisasian lebih bersifat jejaring antar organisasi yang terlibat. Meskipun demikian, Disperdastrri Kabupaten Gowa dan PT. Pertamina memiliki peran penting dalam pengorganisasian pengadaan dan penyaluran LPG di Kecamatan Bajeng Barat.

Pengarahan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa secara serius melalui organisasi perangkat daerah terkait yang Disperdastrri. Namun, agen dan pangkalan selalu tidak tertib dalam melaporkan data realisasi kepada pemerintah. Semestinya, data kuota dan realisasi dilaporkan setiap bulan oleh Agen dan Pangkalan ke Pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah selalu memberikan pengarahan secara berkala pada semua penyalur yang ada di Kecamatan Bajeng Barat secara khusus. Pemerintah memberikan teguran pada kasus tertentu apabila agen dan pangkalan tidak mengindahkan arahan dari yang diberikan.

Pengkoordinasian antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Pertamina dilakukan secara aktif apabila ada masalah yang terjadi seperti kelangkaan tabung dan distribusi kurang lancar. Pengkoordinasian antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gowa juga dilakukan dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Proses pengkoordinasian pada saat terjadi kelangkaan dan masalah lain kerap kurang baik karena masalah terjadi baru dikoordinasikan. Semestinya, semua persoalan yang diperkirakan bisa terjadi diantisipasi sebelumnya untuk menghindari masalah yang sama terus terjadi.

Pengendalian atau pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada agen dan pangkalan dalam distribusi tabung kepada konsumen atau penerima manfaat. Pengawasan ini kadang kurang maksimal karena personil pemerintah yang terbatas dan pihak agen dan pangkalan kerap memainkan kondisi untuk menutupi persoalan yang dihadapi. Pengendalian juga masih dilakukan secara manual sehingga tidak kontrol yang dikembangkan melalui sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, & Noor, R. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Adri Wijaya. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan ILPG 3 kg tahun 2013. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*. Vol. 2(2).
- Efendi, Saladin Wirawan. (2016). Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Palembang. Dosen STIM Amkop Palembang.
- Faisal, A. (2015). Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulio Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru oleh Dinas Perindag Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pangkalan LPG 3 kg). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*. Vol. 2(2).
- Gunawan, W., Arifin, J., Noor, Y. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*. Volume 3(2).
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Handoko, Hani.T. (2013). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang. (1988). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Ghalia Indonesia.
- Manullang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Ghalia Indonesia.
- Mukmin, F. (2018). Pengendalian Distirbusi Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*.

- Volume 5(1).
- Nashar. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pamekasan: Pena Salsabila.
- Oktavia, Livi. (2014). Koordinasi dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Jurnal FISIP Volume 1(1).
- Ramadhan, Triola, Liesmana, R., & Putera, R. E. (2020). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol 1(1).
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensi Media
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Wijayanti, I. D. (2008). *Manajemen*. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press
- Wijaya, A. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Tahun 2013. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 2, Nomor 2, Oktober, 2015.